

	News Title : Kejagung Kolaborasi dengan OJK dan Bappebti Kelola Barang Bukti Kripto	
	Media Name : neraca.co.id	Journalist : Mohar Syarif
	Publish Date : 26 September 2024	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Asep Nana Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : News	Topic : Tangani Pidana Aset Kripto

Kejagung Kolaborasi dengan OJK dan Bappebti Kelola Barang Bukti Kripto

Oleh: Mohar Syarif Kamis, 26/09/2024



BERTA TERKAIT

- Mendagri: 79 RUU Kabupaten/Kota Beri Kepastian Hukum
- Ssm Permudah Penegakan Hukum Fraud Impor Prekursor Farmasi - Stranas PK:
- Aturan Rekrutmen Tenaga Kerja Kembali Dipersoalkan di MK
- Pentingnya Inovasi di Daerah Turunkan Stunting
- Menko Polhukam - Merawat Persatuan Kunci Keberhasilan Indonesia Emas

NERACA

Jakarta - Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam tata kelola barang bukti aset kripto pada perkara pidana.

Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (25/9), kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asep Nana Mulyana dengan Kepala Bappebti Kasan dan Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Muhammad Ihsanuddin pada Selasa (24/9) malam.

"Dengan adanya kerja sama ini, Bappebti dan OJK akan ikut dalam penyerahan barang bukti kripto yang diserahkan oleh penyidik, sehingga secara objektif dapat memastikan kuantitas dan kualitas aset kripto tersebut," kata Asep.

Kerja sama tersebut, lanjut dia, juga merupakan komitmen dan langkah nyata dari Jampidum untuk membangun standardisasi dalam penanganan perkara untuk menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti kripto secara transparan dan akuntabel.

Ia mengungkapkan saat ini Jampidum telah menyusun petunjuk teknis tata kelola dan standardisasi penanganan barang bukti kripto dalam perkara pidana.

"Untuk tahap awal, akan dipusatkan terlebih dahulu di Jampidum sekaligus menunggu kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Namun, untuk berikutnya, akan kami serahkan ke Badan Pemulihan Aset selaku satuan kerja yang salah satu tugas pokoknya mengelola dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana," katanya.

Oleh karena itu, guna mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia, dalam kesempatan yang sama, digelar *in house training* (IHT) bertajuk "Penguatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dan Standar Penanganan Barang Bukti Aset Kripto dalam Perkara Pidana".

Asep menambahkan dengan semakin maraknya kejahatan siber saat ini maka jaksa perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya, terutama penanganan barang bukti aset kripto.

Menurutnya, penguatan kapasitas pengetahuan dan kemampuan Jaksa merupakan bagian penting dalam rangka penanganan perkara secara akuntabel, profesional, dan optimal.

Selain itu, pelaksanaan pelatihan ini juga menjadi wujud transformasi penuntutan dan penegakan hukum secara modern.

"Melihat antusias positif Jaksa dalam setiap kegiatan IHT, merupakan spirit dan komitmen seluruh Insan Adhyaksa untuk mewujudkan transformasi penuntutan menuju Indonesia Emas 2045," ucap Asep. Ant

0 comments

Sort by Oldest

Add a comment...